

## **Keterlibatan Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Paletina-Israel**

### *Indonesia's Involvement in the Peace Process of the Palestinian-Israeli Conflict*

**Rofiatul Nurhasanah<sup>1</sup>, Debi Setiwati<sup>2</sup>**

Universitas Insan Budi Utomo Malang  
[rofiatulnur03@gmail.com](mailto:rofiatulnur03@gmail.com), [matahariok9@gmail.com](mailto:matahariok9@gmail.com)

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji bagaimana diplomasi Indonesia terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Gesekan dan bentrokan bersenjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel masih terus terjadi dan bahkan dapat menimpa warga sipil Palestina. Sepanjang sejarah kedekatan Indonesia dengan Palestina, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyerukan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Hubungan keilmuan antara ulama Palestina dengan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir menjadikan Palestina sebagai salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia bersama Mesir. Hubungan kedua negara berlanjut hingga saat ini. Artikel ini dijelaskan menggunakan teori resolusi konflik. Lebih lanjut penulis menemukan temuan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Indonesia berperan aktif melalui perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bahkan Indonesia menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump mengenai Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Terbukti Indonesia berperan sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifier dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.

**Kata kunci : Konflik Palestina-Israel, Indonesia, Diplomasi**

**Abstract.** This article examines how Indonesian diplomacy occurred in the Israeli-Palestinian conflict. Friction and armed clashes between Palestinian fighters and the Israeli military continue to occur and can even affect Palestinian civilians. Throughout the history of Indonesia's closeness to Palestine, Indonesia has been one of the countries that has actively called for Palestinian independence with a two-state solution. The scientific relationship between Palestinian ulama and Indonesian students studying in Egypt has made Palestine one of the countries that recognizes Indonesia's independence along with Egypt. Relations between the two countries continue to this day. This article is explained using conflict resolution theory. Furthermore, the author found findings from Indonesian diplomacy in resolving the Israeli-Palestinian conflict, Indonesia played an active role through its role as a non-permanent member of the UN Security Council. Indonesia even opposed US President Donald Trump's policy regarding Jerusalem as the capital of Israel and moved its embassy to Jerusalem. It has been proven that Indonesia plays a role as a co-sponsor, facilitator, mediator, participator, initiator, actor, motivator and justifier in helping resolve the Israeli-Palestinian conflict.

**Keyword: Israeli-Palestinian Conflict, Indonesia and Diplomation**

### **PENDAHULUAN**

Konflik antara Palestina-Israel adalah salah satu konflik yang hingga saat ini menjadi sebuah konflik tak berujung dan belum menemukan titik

temu. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum dapat diselesaikan walaupun sudah banyak negara yang mendorong dalam proses perdamaian. Zionisme yang

dikampanyekan oleh Theodore Herzl menjadi sebuah cikal bakal yang melahirkan sebuah negara yaitu Israel yang dideklarasikan pada tahun 1948 (Mudore, 2019: 171). Deklarasi kemerdekaan bangsa Israel menghantarkan pada konflik yang lebih besar.

Zionisme yang merupakan kelompok dari orang-orang Yahudi mengklaim atas tanah Palestina menjadi sebuah lubang awal yang terjadinya konflik panas diantara keduanya. Israel tidak pernah berhenti dengan upaya perluasan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Palestina yang hanya sebuah negara kecil hanya mampu melawan sekuat tenaganya, dan pada akhirnya tanah-tanah wilayah kekuasaan mereka dirampas untuk dijadikan pemukiman bangsa Yahudi. Masyarakat Palestina yang telah tertindas dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, mengungsi atau tetap bertahan dalam wilayah yang telah dikuasai Israel. Disisi lain, Israel tidak pernah berhenti untuk mengajak dan mendatangkan orang-orang Yahudi ke negara mereka. Mereka mengklaim bahwa Israel adalah rumah tempat kembalinya para warga Yahudi setelah mereka mengalami pembantaian di masa lalu.

Israel yang mendapat dukungan dari negara super power Amerika Serikat (AS) semakin gencar dalam melakukan perebutan wilayah Palestina, walaupun hal itu mendapat tekanan dari negara-negara di dunia yang mengecam dan tidak setuju dengan kebijakan Israel terhadap Palestina. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, namun tidak menemukan jalan keluar hingga Amerika yang akan menjadi negara terdepan yang akan mem-veto resolusi

tersebut.

Palestina yang tidak memiliki kekuatan dan telah berada dalam kekuasaan Israel selalu dipandang sebelah mata oleh Amerika, bahkan Amerika menutup mata tentang hal ini. Perjuangan Palestina dalam upaya merdeka dan bebas dari penjajahan ini selalu mengalami kebuntuan. Mereka dimanfaatkan dan dikepung oleh kepentingan-kepentingan global yaitu Amerika Serikat. Amerika merupakan sekutu Arab dan akan dengan mudah dikendalikan sesuai keinginan Amerika. Bangsa Arab seolah hanya menutup mata dan sebatas formalitas saja, mereka tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lain halnya dengan Indonesia yang mendukung dan memperjuangkan penuh kemerdekaan Palestina, Indonesia merasa berhutang budi karena pada masa lalu Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, sebagai negara yang sama-sama mayoritas Islam dan Indonesia memiliki prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Indonesia menjadi satu negara yang memberikan perhatian penuh pada konflik Israel-Palestina.

Berdasarkan paparan diatas penulis ingin membahas terkait peran diplomasi Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan menggunakan pendekatan teroi resolusi konflik untuk menguraikan bagaimana peran Indonesia dalam konflik tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan sebuah penelitian *library research* dengan data yang didapatkan dengan menggunakan teknik kajian pustaka. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis

berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari beberapa jurnal, buku dan berita terpercaya yang membahas konflik Israel-Palestina. Penyajian data dari hasil penelitian ini disajikan dengan cara deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Palestina-Israel Sebelum Deklarasi Negara Israel 14 Mei 1948

Memasuki abad ke-16, Palestina merupakan sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani (Hermawati, 2005: 130). Dan setelah abad ke-19 tepatnya pada tahun 1897, Zionis berusaha untuk mendapatkan legitimasi atas bangsa Yahudi dan melegitimasi bangsa Arab pada tanah Palestina. Hal ini dilakukan dengan cara melobi langsung kepada Sultan Abdl Hamid II agar memberikan hak bagi kaum Yahudi untuk mengusir penduduk asli Palestina (Z.A, 2002: 17). Sejak saat itu, kaum Zionis bersikukuh terhadap Kekhalifahan Turki Utsmani tetap berlanjut demi mendapatkan tanah khusus untuk dijadikan pemukiman bagi bangsanya dan akan dijadikan negara Yahudi. Namun Kekhalifahan Turki Utsmani tetap teguh untuk tidak memberikan permintaan itu. Negosiasi tersebut dirasa tidak berhasil akhirnya kaum Zionis melobi Inggris untuk memuluskan keinginannya. Namun Inggris menawarkan tanah yang ada di Uganda atau Amerika Latin, tetapi kaum Zionis menolak. Kaum Zionis menganggap tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Yahudi sebagai pewaris sah dari tanah tersebut (Noor, 2014: 325). Theodore Herzl, yang merupakan pencetus gerakan *Freemasonry* menuliskan sebuah artikel

*Der Judenstaat* (Negara Yahudi) pada tahun 1896. Kaum Zionisme politis mulai melakukan gerakan melalui tulisan ini. Pada tahun 1897, kaum Zionis mengadakan sebuah kongres Zionis pertama di Basel, Swiss yang membahas tentang pendirian sebuah negara Yahudi dan menjadikan dunia sebagai budak Zionis serta mengambil Al-Quds sebagai Ibukota Pemerintahan Negara Zionis (Noor, 2014: 321). Bahkan Herzl menyatakan bahwa Zionisme adalah jawaban atas semua penderitaan yang telah dialami oleh bangsa Yahudi, kini saatnya bangsa Yahudi hidup dengan aman dan tenang di sebuah tanah warisan leluhur mereka (Sihbudi, 2007: 323).

Pengungsi Yahudi mulai masuk ke tanah Palestina dalam kurun waktu 1881-1903. Dan selanjutnya terjadi pada kurun waktu 1904-1924 yang datang dari bangsa Yahudi Uni Soviet (Sihbudi, 2007: 459-460).

Pada saat Perang Dunia I selesai, Zionis menjadi pihak yang sangat diuntungkan karena Turki Utsmani mengalami kekalahan. Kaum Zionis mendapat ruang bebas untuk mendapatkan keinginannya. Pada tahun 1916, terbentuk suatu perjanjian yaitu *Sykes-Picot* antara Inggris-Rusia-Prancis sebagai alat untuk mencengkrum Dunia Arab dan membagi-bagi wilayah Turki Utsmani agar mereka bisa melepaskan diri dari Kekhalifahan (Friedman, 1990). Selain itu, pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yakni Arthur James Balfour memberikan sebuah jaminan terhadap keinginan Yahudi tersebut melalui Pemimpin Komunitas Yahudi di Inggris, Lord Rothschild. Dalam deklarasi Balfour, dinyatakan bahwa Inggris siap membantu kaum Zionis dalam mewujudkan sebuah Negara

Yahudi (Noor, 2014: 327-328). Hingga akhirnya pada tahun 1923 Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai tanah Palestina. Hal ini menimbulkan pertentangan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab disana.

Kedatangan pengungsi Yahudi terjadi kembali pada kurun waktu 1924-1928. Mereka merupakan kelompok bangsa Yahudi dari kelas menengah Eropa Timur dan Uni Soviet (Sihbudi, 2007: 460). Pada tahun 1929 terjadi kerusuhan antara kaum Zionis dan Palestina di wilayah Tembok Barat. Kerusuhan ini berlangsung selama seminggu, yang mengakibatkan tewasnya 115 orang Arab dan 133 Orang Yahudi. Pada tahun 1933, Adolf Hitler mulai berkuasa di Jerman. Ia membuat undang-undang yang berisi diskriminasi atas bangsa Yahudi. Pada tahun 1935, pengungsi Yahudi semakin meningkat, kaum Yahudi banyak yang mearikan diri dan mengungsi ke luar negeri terutama ke Amerika Serikat (Sihbudi, 2007: 460).

Sekitar tahun 1936, terjadi sebuah revolusi Arab di Palestina terhadap penguasa Inggris disana. Namun, kaum Zionis membantu Inggris meredam pemberontakan ini. Hal ini berakibat mereka mengusir para pemberontak dan mengeksekusi para pimpinannya. Sebaliknya, pada kurun waktu 1936-1939 penyiksaan terhadap bangsa Yahudi di Jerman semakin meningkat dan berkelanjutan. Sejak revolusi Arab terjadi, dalam laporan *British Peel Commission* terdapat usulan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Yahudi dan Arab. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat Arab.

Saat Perang Dunia II

berkecamuk, Adolf Hitler melihat kekalahan Jerman di Perang Dunia I menjadi penyebab pengkhianatan orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan Sekutu. Oleh karena itu, Hitler menyebarkan *anti-Semitisme* di Jerman dan wilayahnya. *Endivsung* (penyelesaian akhir) bagi bangsa Yahudi tidak bisa dihindari. Enam juta orang Yahudi, jutaan orang Slavia, homoseksual, Roma dan "kelompok yang tidak diinginkan" lainnya menjadi korban kekejaman Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Kisah ini dijadikan alat oleh Zionis untuk menarik simpati dunia dalam mewujudkan berdirinya negara Yahudi (Sihbudi, 2007: 460).

Pada tahun 1939 terjadi ketegangan antara Zionis dan penguasa Inggris di Palestina. Dalam Buku Putih *MacDonald* Inggris merekomendasikan dukungan terhadap imigran Yahudi, pembelian dan tuntutan tanah berdirinya dua negara merdeka dalam waktu sepuluh tahun. Hal ini membuat marah orang-orang Yahudi sehingga mereka memutuskan aliansi Anglo-Zionis mereka. Puncaknya, kelompok militan Yahudi pimpinan Menachim mulai menyatakan perang terhadap Inggris di Palestina.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dan banyak orang Yahudi masih mengungsi dan tidak memiliki tempat tinggal. Mereka adalah orang Yahudi Eropa Timur dan Tengah. Pada tahun berikutnya PBB menerima rekomendasi dari Komisi Penyelidikan Anglo-Amerika yang memberikan mandat atas tanah Palestina. Namun di Palestina sendiri terjadi kekerasan antara warga Palestina dan Yahudi terhadap satu sama lain dari pihak Inggris. Tahun ini masih ada

gelombang masuk orang Yahudi ke Palestina melalui jalur ilegal dan bawah air. Pada tahun 1947, Inggris meminta penangan PBB atas tanah Palestina dan merekomendasikan pembagian tanah Palestina antara Arab dan Yahudi, sedangkan Yerusalem sendiri berada di bawah pengawasan PBB (Hermawati, 2005:134).

Inggris mengakhiri mandatnya atas tanah Palestina pada tahun 1948. Pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya mandat Inggris, kaum Zionis mendeklarasikan berdirinya negara Israel sebagai negara Yahudi (Friedman, 1990). Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara Arab, mereka mengkritik dan menyatakan perang terhadap Israel. Israel sendiri menguasai 77% tanah Palestina yang mereka dapatkan dari mandat Inggris. Yerusalem terbagi menjadi beberapa bagian. Warga Palestina yang mengungsi selama dan setelah perang tidak kembali ke rumah mereka. Padahal PBB telah mendukung hak pengungsi Palestina melalui resolusi PBB nomor 194 untuk kembali ke kampung halamannya dan mereka mempunyai hak atas perdamaian ketika enggan untuk kembali (Garaudy, 2000: 112-113). Saat itu masih banyak orang Palestina yang bertahan di negara baru yang saat ini bernama Israel.

## **2. Perjalanan Konflik Palestina-Israel 1948-2017**

Pada kurun waktu tahun 1948-1958 terjadi imigrasi besar-besaran oleh kaum Yahudi ke Palestina. Imigran Yahudi berasal dari Afrika Utara, Eropa dan Asia berhasil didatangkan oleh Israel ke Palestina yang telah diklaim sebagai negara Israel. Pada tahun 1949, terjadi perang antara tentara Israel dengan negara-negara Arab (BBC News, 2014).

Pada tahun 1950, Israel menyita hak milik bangsa Arab dalam skala banyak dan luas. Israel menetapkan UU tentang Hak Kembali dan Menetap di daerah asal bagi kaum Yahudi. Zionisme mulai memperlihatkan kekejamannya atas bangsa Arab. Pada tahun 1959-1957 terjadilah perang Suez antara Israel dan Mesir. Pada perang ini Israel mendapatkan bantuan dari Prancis dan Inggris sehingga mereka bisa menang, akan tetapi mereka tetap harus mundur dari Jalur Gaza dan Sinai.

Pada tahun 1964, terbentuklah *Palestine Liberation* (PLO) oleh Liga Arab yang dibentuk sebagai wadah perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi konflik dengan Israel. PLO menjadi satu-satunya organisasi yang dianggap sah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. PLO juga didirikan dalam rangka menjaga kepentingan negara Arab. Selain itu, PLO juga didirikan untuk membawahi gerakan-gerakan perjuangan rakyat Palestina dalam perebutan wilayah dan perjuangan kemerdekaan. Pada awal pembentukannya PLO tidak mendapat antusiasme dari rakyat Palestina. Mereka berpandangan bahwa organisasi ini hanya akan menjadi simbol tanpa hasil yang efektif (Sihbudi, 1993: 76). Namun, sering berjalannya waktu PLO semakin mendapat dukungan dan beberapa organisasi lain turut bergabung di dalamnya. Organisasi tersebut meliputi Fatah Front Rakyat untuk pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum, al Saiqah, Front Pembebasan Arab dan yang lainnya (Sihbudi, 1993: 76). Pada saat PLO dipimpin oleh Yasser Arafat, dia berhasil meningkatkan citranya di mata dunia.

Dunia akhirnya menganggap PLO sebagai otoritas sah atas perjuangan rakyat Palestina. PLO adalah akil rakyat yang benar-benar sah (Sihbudi, 1993: 76)

Pada tahun 1967, Israel melakukan penyerangan yakni di Tepi Barat, Jalur Gaza (Friedman, 1990: 218), Israel berhasil menguasai wilayah Gurun Sinai di Mesir dan Dataran Tinggi Golan di Syria. Selain itu, Israel juga meluaskan perbatasan Yerussalem. Pada tahun ini juga PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menarik pasukannya dari wilayah yang baru didudukinya. Pada tahun 1968, Israel membangun desa-desa Yahudi di wilayah yang baru saja didudukinya. Pada tahun 1969, Yasser Arafat dari faksi Fatah terpilih menjadi pemimpin PLO yang berbasis di Yordania. Namun, pada tahun 1970 terjadi perang saudara antara Palestina dan Yordania, yang mengakibatkan pengusiran PLO dari Yordania. Pada akhirnya markas PLO dipindahkan ke Lebanon. Pengaruh AS di Yordania menjadi salah satu pemicu diusirnya PLO dari Yordania. Pada bulan Oktober 1973, Mesir dan Suriah menyerang Israel di Dataran Tinggi Sinai dan Golan. Mereka hampir mampu mengusir Israel, namun AS membantu Israel. Maka Anwar Sadat selaku pemimpin Mesir memilih berkompromi dengan mereka. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 338 yang berisi gencatan senjata dan sidang perdamaian komprehensif.

Pada tahun 1974, Yasser Arafat berpidato di PBB dan ia berhasil menarik simpati dunia serta mendorong dunia untuk mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Kekuatan Amerika Serikat (AS) berada di balik kepentingan Israel semakin terlihat dan

muncul ke permukaan. Pada tahun 1975 mereka berjanji kepada Israel bahwa mereka tidak akan berbicara dengan PLO sampai PLO mengakui resolusi PBB 242 dan 338. Pada pemilu tahun 1976, kandidat PLO memenangkan pemilihan kota di Tepi Barat. Tahun berikutnya, partai Likud memenangkan pemilu di Israel. Menachim Begin berhasil menjadi Perdana Menteri.

Pada kurun waktu 1978-1985 terjadi peristiwa penting terkait Israel-Palestina-Lebanon-Suriah-Mesir. Pada tahun 1978, Israel menginvasi Lebanon Selatan. Tahun ini, Sadat, Begin dan Presiden Jimmy Carter menandatangani Perjanjian *Camp David*. Pada tahun berikutnya, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian perdamaian Mesir-Israel di Washington. Israel kembali bertindak dengan mencaplok Yerusalem Timur melalui undang-undangnya mengenai pencaplokan Yerusalem. Hal ini mengundang kritik dari PBB. Pada tahun 1981 terjadi gencatan senjata antara Israel dan PLO hingga Juni 1981. Namun Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan Suriah. Pada tahun berikutnya, 1982, Israel menginvasi Lebanon yang mengakibatkan markas besar PLO dipindahkan ke Tunisia. Tahun ini terjadi pembantaian besar-besaran di Sabra dan Shatila (Garaudy, 2000:124). Pelanggaran ini gagal dibawa ke forum internasional karena adanya veto dari AS. Sikap AS ini membuat Israel semakin berani. Pada tahun 1984, Israel mengadakan pemilu awal yang memisahkan pemerintahan koalisi Partai Buruh-Likud dan Knesset. Pada tahun berikutnya, Israel menarik diri dari sebagian Lebanon, namun mereka tetap meninggalkan pasukan Lebanon dalam koalisi dengan Israel. Tahun ini juga

markas PLO di Tunisia dibom oleh Israel.

Terjadi gelombang intifada Palestina tanpa kekerasan pada periode 1987-1993. Pada tahun 1988, pemilu di Israel mengakibatkan perpecahan *Knesset* dan Persatuan Nasional Pemerintah. Pertemuan Dewan Nasional Palestina mendeklarasikan Negara Palestina di Aljazair. Pada akhirnya Arafat menerima resolusi PBB nomor 242 dan 338 yang berimplikasi pada terbukanya dialog dengan Amerika. Selain itu, Arafat mengakui keberadaan negara Israel. Kementerian Luar Negeri menerbitkan laporan yang sangat kritis mengenai praktik hak asasi manusia di Israel pada tahun 1989. Tahun ini juga terjadi demonstrasi besar-besaran mengenai perjanjian internasional di Yerusalem. Tahun berikutnya, 1990, Pemerintahan Koalisi Israel runtuh setelah mengusulkan perundingan dengan Palestina. Ada imigrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet ke Israel. Yitzhak Shamir membentuk pemerintahan sayap kanan terbatas yang dipimpin oleh Likud, sementara Amerika menunda dialog dengan PLO (Sihbudi, 2007: 462-463)

Pada tahun 1991, konferensi perdamaian internasional Arab-Israel diadakan di Madrid. Palestina termasuk dalam delegasi tersebut bersama Yordania-Palestina. Pada tahun 1992, diplomasi Israel-Palestina terus berlanjut. Di sisi lain, pemilu Israel dimenangkan oleh Partai Buruh dan mengangkat Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1993, Israel membatasi pergerakan warga Palestina. PLO dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo yang berisi struktur pemerintahan mandiri sementara. Terjadi pembantaian warga Palestina di masjid

Hebron yang dilakukan oleh pemukim Israel bernama *Baruch Goldstein*. Perjanjian Kairo lahir sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Oslo. Selanjutnya, Arafat mendirikan markas bersama dengan Otoritas Palestina di Gaza. Tahun ini Yordania dan Israel juga menandatangani perjanjian damai (Sihbudi, 2007: 463). Pada tahun 1995 Perjanjian Oslo II menerapkan pembagian pengawasan Tepi Barat menjadi tiga bentuk, yaitu: Area A untuk pengawasan langsung Palestina, Area B untuk pengawasan sipil Palestina dan Israel, dan Area C untuk pengawasan Israel. Tahun ini, Rabin dibunuh oleh seorang Yahudi bernama Yigal Amir di Tel Aviv.

Tahun 1996 merupakan pemilu pertama bagi rakyat Palestina untuk pemilu Presiden dan Parlemen. Arafat keluar sebagai Presiden. Di sisi lain, Benjamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel. Pada tahun 1997, Kota Hebron dibagi menjadi wilayah Palestina dan Israel. Israel kembali membangun pemukiman Har Homa untuk umat Yahudi yang terletak di antara Yerusalem dan Betlehem. Pada tahun 1998, PLO menolak klausul anti-Israel dalam konstitusi PLO. Setahun kemudian Ehud Barak terpilih menjadi Perdana Menteri Israel (Sihbudi, 2007: 463).

Tahun 2000 adalah tahun ketika Otoritas Palestina memperoleh kendali langsung atau tidak langsung atas 40% Tepi Barat dan 65% Gaza. Tahun ini KTT Camp David gagal. Warga Palestina melakukan pemberontakan besar-besaran sebagai reaksi atas kunjungan Ariel Sharon ke Al Haram sebagai Syarif yang didampingi 1.000 tentara bersenjata. Pada tahun 2001 konflik Israel-Palestina semakin

memanas. Kelompok garis keras Palestina melakukan bom bunuh diri terhadap militer dan warga sipil Israel. Sebaliknya, pasukan Israel telah meningkatkan pembunuhan terhadap warga Palestina dan serangan udara di wilayah yang dikuasai Palestina. Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri tahun ini. AS sendiri menyerukan gencatan senjata dan pembekuan total pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bom bunuh diri Palestina dan Pembunuhan yang Ditargetkan Israel berlanjut pada tahun 2003. Pada tahun 2002, Israel kembali memaksakan diri untuk menduduki kembali wilayah yang telah ditinggalkannya. Israel membangun tembok keamanan di Tepi Barat. Di sisi lain, Arafat menjadi tahanan rumah di Ramallah. Pada akhirnya, Liga Arab mendorong untuk mengakui negara Israel, dengan harapan berakhirnya pendudukan Israel di Palestina. Uni Eropa, Amerika, Rusia dan PBB mengusulkan '*Road Map*' perdamaian bagi kedua negara (Sihbudi, 2007: 464).

Pada tahun 2003, Mahmud Abbas terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina. Namun tak lama kemudian ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Ahmad Qurei. Di sisi lain, Israel kembali menyelesaikan pembangunan tembok keamanan di Tepi Barat. Pada 11 November 2004, Yasser Arafat meninggal dunia pada usia 75 tahun. Ia dimakamkan di Ramallah. Pada 10 Januari 2005, Mahmud Abbas dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Presiden. Pada 19 Agustus, Jalur Gaza dibersihkan dari pemukim Yahudi. Terjadi kekacauan dalam tubuh politik Israel, pada 10 November Amir Perez mengalahkan Shimon Peres dalam pemilihan ketua partai Buruh. Dia juga

menarik partainya dari perdamaian. Kemudian pada 21 November, Ariel Sharon mengundurkan diri sebagai ketua Partai Likud dan mendirikan partai berhaluan tengah bernama Kadima. Selanjutnya Shimon Peres mengundurkan diri dari partai Buruh dan bergabung dengan partai baru Ariel Sharon. Pada pertengahan Desember 2005, Ariel Sharon menderita stroke dan dirawat di rumah sakit. Semakin hari, penyakit Ariel Sharon semakin parah. Pada akhirnya kekuasaannya diberikan kepada Ehud Olmert. Pada tanggal 26 Januari 2006, Hamas memenangkan pemilu Palestina. Ismail Haniya diangkat menjadi pemimpin Hamas setelah kematian Syekh Ahmad Yasin.

Pada tahun 2007, Israel memperketat kendali atas Jalur Gaza setelah Hamas memaksa kelompok saingannya, Fatah, keluar dari Jalur Gaza. 27 Desember 2008-17 Januari 2009, Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata. Pasca tahun 2010, kebijakan pemerintah Israel yang mulai diterapkan pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza semakin parah. Pada tanggal 29 November 2012, Negara Palestina secara resmi disetujui sebagai negara pengamat non-anggota PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB no. 67/19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Sejak tahun 2007, Hamas dan Fatah mengalami perpecahan dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Namun pada tahun 2014, keduanya sepakat untuk melakukan rekonsiliasi sementara (*al-mushalahahi*). Berdasarkan Burdah, rekonsiliasi ini harus menjadi modal penting bagi keduanya sebagai kekuatan perjuangan Palestina (Burdah, 2014: 93). Pada Juli 2014, Israel melakukan agresi

militer ke Jalur Gaza. Pada tanggal 26 Agustus 2014, gencatan senjata tanpa batas waktu mulai berlaku antara Israel dan Palestina (BBC News, 2014). 30 Oktober 2014, Israel menutup Masjid Al-Aqsa akibat penembakan Rabbi Yehuda Glick (Purnamasari, 2017). Namun, keesokan harinya Israel mengumumkan pembukaan Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam setelah adanya seruan dari negara-negara Arab dan Amerika Serikat. Bentrokan pasukan Israel-Palestina tak kunjung usai. Pada 26 Juli 2015, 19 penjaga Masjid Al-Aqsa bertolak dengan pasukan Israel. Mereka memasuki masjid saat terjadi bentrokan dengan warga Palestina. Umat Muslim marah karena masjid dibuka untuk orang Yahudi untuk merayakan Tisha B'av. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kekerasan di Yerusalem, terutama pada akhir tahun ini.

Kabar mengejutkan dari konflik Palestina adalah pernyataan Presiden Amerika, pada Rabu 6 Desember 2017, bahwa Donald Trump mengakui secara sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Selain itu, Amerika juga berniat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pernyataan tersebut mengundang kritik dari dunia internasional di Eropa, Asia, dan Indonesia. Kabar ini langsung menimbulkan kehebohan di beberapa belahan dunia, terutama di negara-negara yang memiliki populasi Muslim relatif besar. Indonesia sendiri menjadi aktor penting dalam menghadapi pemberitaan tersebut.

Pada peringatan 70 tahun kemerdekaan Israel, 14 Mei 2019, AS meresmikan gedung kedutaan besarnya di Yerusalem. Presiden Trump tidak

hadir langsung saat meresmikan kedutaan. Pejabat Amerika yang hadir antara lain Menteri Keuangan Amerika, Duta Besar Amerika untuk Israel, Duta Besar Amerika untuk Timur Tengah, anak Donald Trump, Ivanka Trump dan suaminya, Jared Kushner.

### **3. Peran Diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina**

Indonesia selalu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina mempunyai posisi strategis dalam konflik mediasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina. Selain sama-sama menganut agama Islam, cita-cita luhur Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang akan selalu mendukung dan membantu menunjang kemerdekaan tersebut. sebuah bangsa yang sudah lama tertindas. Selain itu, diplomasi Indonesia sendiri merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menjaga komunikasi dengan negara berkembang.

Hubungan Indonesia dan Timur Tengah ditandai dengan hubungan pendidikan. Sejak sebelum kemerdekaan, generasi muda Indonesia banyak yang merantau ke Timur Tengah, baik Mesir maupun Arab, untuk mencari ilmu kepada para ulama di sana. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan adalah dua sosok yang mengenyam pendidikan di sana dan kemudian keduanya menjadi sosok yang disegani dan disegani di kalangan masyarakat Indonesia.

Sejarah menyebutkan, hubungan erat antara Indonesia dan Palestina sudah

terjalin sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan beberapa generasi muda yang belajar di Timur Tengah dan bertemu dengan syekh dari Palestina, seperti Kahar Muzakkar yang belajar di Mesir dan bertemu dengan Sayyid Amin al Husaini. Syekh inilah yang memberikan respon baik dengan mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia ketika mendengar kabar kemerdekaan Indonesia (Hakim, 2017). Palestina dan Mesir merupakan dua negara pertama yang mengakui kemerdekaan Negara Indonesia. Saat itu, Indonesia sangat membutuhkan pengakuan demi kelangsungan hidup suatu negara. Dari sinilah Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya melalui berbagai perjuangan dan pengorbanan.

Dengan menempuh politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memosisikan diri sebagai bangsa yang menolak kolonialisme dan membela rakyat Palestina. Berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di kancah internasional yaitu PBB (Sihbudi, 1997: 146).

Ketika Indonesia berstatus anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008), Indonesia selalu berupaya memperjuangkan perlindungan dan jaminan hak-hak rakyat Palestina melalui badan perdamaian dunia, PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Di ranah PBB, Indonesia berperan aktif dalam memprioritaskan konflik Israel-Palestina. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia mendorong diselenggarakannya Sidang Khusus Dewan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan pada tanggal 9 Januari dan 12 Januari 2009. Indonesia

merupakan salah satu penggagas utama Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang 15-16 Januari 2009 yang membahas masalah Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Pada tanggal 29 November 2012, Negara Palestina secara hukum diakui sebagai negara pemantau non-anggota PBB melalui co-sponsor dari Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Saat Konferensi Asia Afrika digelar di Indonesia, KAA menghasilkan deklarasi dukungan terhadap Palestina. Deklarasi ini dinamakan Deklarasi Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a). Selanjutnya, Indonesia menjadi negara co-sponsor dalam momen penting bagi Negara Palestina, yaitu dalam upacara bersejarah pengibaran bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York. Pada 14-15 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem yang diselenggarakan bersama dengan OKI dan *United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People*.

Dalam membangun komunikasi dengan Israel, Indonesia memilih untuk tidak membuka jalur diplomasi dengan Israel. Isu dibukanya jalur diplomasi antara Indonesia dan Israel muncul pada masa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto melalui tokoh NU saat itu, Abdurrahman Wahid (Sihbudi, 1997: 135). Namun hingga saat ini permasalahan tersebut tidak pernah terjadi. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai pengkritik segala bentuk kolonialisme tidak akan membuka jalur diplomasi dengan Israel sebelum mereka bersedia mengakui keberadaan Negara

Palestina yang merdeka dan berdaulat (Sihbudi, 1997: 146), karena Indonesia sendiri adalah negara yang merdeka dan berdaulat. negara-negara pendukung solusi dua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Indonesia mengambil langkah cepat dalam menyikapi pernyataan kontroversial Presiden Amerika Donald Trump. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luar Negerinya untuk segera melakukan perjalanan ke Yordania, Lebanon, Eropa, dan Turki (Ramdhani, 2017). Indonesia langsung mengecam pernyataan sepihak Donald Trump yang menghambat cita-cita perdamaian kedua negara. Tak hanya Menlu, Presiden Joko Widodo juga turut ambil bagian dalam Konferensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki. Peran resolusi dalam konflik Israel-Palestina tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintah saja. Namun di Indonesia, gelombang protes langsung muncul dan muncul aksi solidaritas Palestina yang mengecam pernyataan Trump terkait Yerusalem. Tindakan yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan bentuk dukungan moral terhadap bangsa Indonesia atas penderitaan yang menimpa rakyat Palestina (Media Indonesia, 2017).

Rabu 13 Juni 2018, Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Tsaquf memberikan kuliah umum yang diselenggarakan Trumane Institute. Selain itu, ia juga didaulat menjadi pembicara di Forum Global *American Jewish Committee* (AJC). Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa kehadirannya di sana adalah untuk Palestina. Selain itu, ia menyatakan kehadirannya di sana bukan sebagai perwakilan negara atau Nahdlatul Ulama, melainkan inisiatif pribadi. Ia menyadari reaksi masyarakat dunia

terhadap langkah tersebut. Langkah tersebut dinilai kontroversial karena dianggap merugikan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Tak sedikit pihak yang mengkritik langkahnya. Indonesia menyatakan posisinya menyikapi kebijakan Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dengan mengecam keras kebijakan tersebut.

Indonesia menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB serta dapat mengancam proses perdamaian. Indonesia mengajak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengikuti langkah kebijakan Amerika Serikat. Pemerintah dan rakyat Indonesia selalu bersama-sama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Pembangunan pemukiman Yahudi yang dilakukan pemerintah Israel mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Indonesia secara aktif menegaskan bahwa langkah tersebut ilegal. Di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan langkah membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, akan semakin memupus harapan akan solusi dua negara. Perkembangan ini adalah sumber berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Lebih lanjut Menlu menyatakan bahwa masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan Israel yang membangun pemukiman ilegal (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Salah satu bentuk dukungan konkrit Indonesia terhadap Palestina adalah memperkuat dukungan negara-negara Asia-Afrika terhadap kapasitas Palestina melalui peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA). Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Pertanyaan Yerusalem yang merupakan hasil kerja sama antara OKI dan Komite PBB tentang Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina. Pada tanggal 6-7 Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI ke-5 yang membahas isu Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif, pertemuan ini merupakan pengembangan dari bentuk penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a).

Bantuan lain yang diberikan Pemerintah Indonesia adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina, pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, manufaktur ringan dan pertanian senilai USD 1,5 juta, bantuan pembangunan Indonesia Cardiac Center di Palestina, rumah sakit AS. - Syifa di Gaza. Indonesia bahkan aktif berkontribusi pada UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees*) pada periode 2009-2014 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a)

Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyatakan sikapnya dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019a), yaitu:

1. Mendukung solusi dua negara (Israel dan Palestina), berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia, dan agar kedua belah pihak

mematuhi parameter yang telah dibentuk dalam sejumlah resolusi PBB.

2. Menekankan perlunya sikap yang seimbang (tidak memihak) dari masyarakat internasional dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian.

3. Mendukung pentingnya menjaga kelangsungan kerja UNRWA (*UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) dalam memberikan pelayanan kepada pengungsi Palestina, serta mempengaruhi perlunya keterlibatan komunitas internasional dalam membantu Palestina pengungsi, khususnya dalam menjamin masa depan anak-anak.

4. Indonesia konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

## SIMPULAN DAN SARAN

Konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung telah berlangsung selama lebih dari setengah abad tanpa akhir yang jelas. Sikap keras kepala Israel mampu mengantarkan mereka menguasai sebagian besar tanah Palestina. Impian Zionis untuk mewujudkan Negara Yahudi yang berdaulat sepertinya hanya tinggal menghapus nama Palestina dari ingatan dunia. Di sisi lain, Palestina tak pernah tinggal diam melihat tanahnya dirampas Zionis. Mereka berjuang untuk mendapatkan kembali tanah air mereka. Perjuangan rakyat Palestina selalu menemui jalan buntu mengingat Israel mendapat dukungan dari negara adidaya Amerika Serikat. Setiap upaya Otoritas Palestina di panggung dunia PBB selalu digagalkan oleh veto Amerika Serikat.

Indonesia berperan penting dalam mengawasi konflik antara Israel dan Palestina. Indonesia telah mengambil peran yang tidak bisa dianggap remeh dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia telah bermain peran co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifier dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.

#### DAFTAR RUJUKAN

- BBC News. 2014. “‘‘ Hamas-Israel Gencatan Senjata. ’’” Retrieved January 21, 2024 ([https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140731\\_gaza\\_gencatan\\_senjata](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140731_gaza_gencatan_senjata)).
- Burdah, Ibnu. 2014. *Islam Kontemporer, Revolusi Dan Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Friedman, Thomas L. n.d. *Dari Beirut Ke Jerussalem. Diterjemahkan Oleh Busoni Sondakh Dan Ardy Handoko*. Jakarta: Erlangga.
- Garaudy, Roger. 2000. *Mitos Dan Politik Israel*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Lukman. 2017. “‘‘ Hubungan Bersejarah Indonesia Dan Palestina. ’’” *Republika Online*. Retrieved January 21, 2024 (<https://republika.co.id/share/otq3p0385>).
- Hermawati. 2005. *Sejarah Agama Dan Bangsa Yahudi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019a. “‘‘ Indonesia Serukan Penghentian Pembangunan Pemukiman Illegal Israel Di Palestina. ’’ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Retrieved (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/251/berita/indonesia-serukanpenghentian-pembangunanpemukiman-illegal-israel-dipalestina>).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019b. “‘‘ Isu Palestina. ’’” Retrieved January 21, 2024 ([https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman\\_list\\_lainnya/isupalestina](https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isupalestina)).
- Media Indonesia. n.d. “‘‘ Aksi Bela Palestina. ’’” *18 Desember 2017*. Retrieved ([https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1245-aksibela-palestina](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1245-aksibela-palestina)).
- Mudore, Syarif Bahaudin. 2019. “‘‘ Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. ’’” *Jurnal CMES* 12(2):170. doi: 10.20961/cmcs.12.2.37891.
- Noor, Yuliana. 2014. *Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya)*. Yogyakarta: Ombak.
- Purnamasari, Niken. 2017. “‘‘ Konflik ‘‘ Berdarah ’’ Tak Berujung IsraelPalestina Di Al-Aqsa. ’’” *Detiknews*. Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d3571269/konflik-berdarah-takberujung-israel-palestina-di-alaqsa>).
- Ramdhani, Jabbar. 2017. “‘‘ Menlu Ajak Yordania Perkuat Dukungan

Untuk Palestina Di KTT OKI.”  
*Detiknews*. Retrieved  
(<https://news.detik.com/berita/d3765123/menlu-ajak-yordaniaperkuat-dukungan-untukpalestina-di-ktt-oki> ).

Sihbudi, Riza. 1993. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.

Sihbudi, Riza. 1997. *Indonesia-Timur Tengah: Masalah Dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan.

Suhartiningtyas. 2014. ““Analisa Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Untuk Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dalam Upaya Peduli Perdamaian Palestina-Israel”.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3:841–56.

Z.A., Maulani. 2002. *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Daseta.